

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan tidak hanya mengungkap-kan fakta-fakta (fact finding), tetapi juga mengidenti-fikasi masalah-masalah (problem identification) terhadap pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan di Kabupaten Dati II Kendari.

Di samping itu pula untuk mencari pemecahan masalah (problem solving) yang tepat dan sesuai terhadap kendala-kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan, terutama untuk kepentingan pembangunan daerah.

Metode penelitian ini adalah metode sosiologik empirik. Sedangkan analisis data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif-deskrif-tif analisis.

Dalam penelitian ini diperoleh data bahwa Keppres No. 55 Tahun 1993 yang mengatur tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Dati II Kendari secara prosedural belum se-penuhnya dilaksanakan, terutama dalam hal musyawarah dan pemberian ganti rugi tanah.

Hambatan-hambatan yang dialami di dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Dati II Kendari, baik pihak pemerintah maupun pihak pemilik hak atas tanah

adalah :

- a. Di pihak pemerintah adalah, masih rendahnya tingkat Pendapatan asli daerah, sehingga tidak dapat membiayai pembangunan di Kabupaten Dati II Kendari, termasuk pembangunan pengadaan tanah. Di samping itu pula masih banyaknya (60%) para pemilik hak atas tanah yang belum memiliki alat bukti pemilikan secara formal, dalam arti belum mempunyai sertifikat.
- b. Di pihak pemilik hak atas tanah hambatannya adalah masih rendahnya ganti rugi yang diberikan, tenggang waktu pembayaran ganti rugi yang terlalu lama serta adanya tindakan para aparat hukum yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka tercapainya pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan adalah:

Pertama, dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan jalan menggali sumber-sumber potensi daerah yang belum dilaksanakan; seperti pengenaan pajak progresif terhadap para pemilik tanah yang melampaui batas maksimum.

Ke dua meningkatkan kesadaran hukum, baik para birokrat pelaksana hukum maupun para anggota masyarakat melalui penyuluhan hukum.

Ke tiga peningkatan kualitas aparatur hukum melalui pendidikan dan keterampilan.

ABSTRACT

The Study intends not only to reveal fact (fact finding), but also to identify problems (problems identification) involved in land-provision implementation for developmental concern in subregion of Kendari regency.

Simultaneously, this study also intends to seek for solution (problem solving) that is appropriate to the obstacles standing in the way of land-provision implementation for developmental concern, especially for regional interest.

Method applied is empirical sociological one. It is supported by qualitative descriptive analysis.

Data achieved in this study show that Keppres No. 55 Tahun 1993 regulating civil interest in subregion of Kendari regency hasn't been fully implemented, particularly in the case of discussion absence and of unfair compensation.

Obstacles underwent in land-provision implementation for civil-interest scoping development in subregion of Kendari region, either by government or land title holders are that:

To government, the low regional income has made development in subregion of Kendari out of reach. Moreover, many land title holders haven't had formal certificate as an evidence of possession.

To land title holders, unfair or low compensation lengthy time during which compensation has been delivered and law officials conducts that deviated in-effect procedur all are unreasonable.

Appropriate land provision for developmental concern can be achieved.

First, by elevating regional income through local potential source exploration; like progresive tax exertion to land holders who are beyond maximum limit.

Second, by heightening law knowledge and morality to state law practitioner and society through law extension.

Third, by raising law apparatur quality through increased skill and education.